

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG DALAM PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BADUNG

I Putu Suardana Putra

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: suardanaputra30@gmail.com

ABSTRACT

General elections are one of the pillars of democracy as a means of realizing people's sovereignty in order to produce a democratic government. One group that needs special attention in elections is persons with disabilities. In Badung Regency, the use of the right to vote for disabilities was only an average of 40.89% (202 out of 494 people) in the 2019 elections and 52.83% (652 out of 1,234 people) in the 2020 Badung regional elections. They felt uncomfortable with the TPS layout that did not friendly for disability access, besides wanting to remain in an ecosystem that they feel is no different. The type of research in this thesis uses empirical legal research. These problems are studied using the theory of human rights protection, democracy theory, role theory, and legal system theory. Collecting data and research using interview and observation techniques. The fulfillment of the right to vote for persons with disabilities is the implementation of political rights for persons with disabilities in elections based on a human rights perspective, namely the protection of civil and political rights of every citizen.

Keywords: Elections, Voting Rights, Persons with Disabilities.

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus dalam Pemilu adalah penyandang disabilitas. Di Kabupaten Badung penggunaan hak pilih disabilitas hanya rata – rata 40,89% (202 dari 494 orang) pada Pemilu 2019 dan 52,83% (652 dari 1.234 orang) pada Pilkada Badung 2020. Mereka merasa tidak nyaman dengan tata ruang TPS yang tidak ramah akses disabilitas, disamping ingin tetap berada pada ekosistem yang mereka rasa tidak berbeda. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan teori perlindungan HAM, teori Demokrasi, teori peranan, dan teori sistem hukum. Pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas merupakan implementasi dari hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu berdasarkan perpektif HAM yaitu perlindungan hak sipil dan politik setiap warga negara.

Kata Kunci: Pemilu, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas.

